

Historical Memory "Nanjing Massacre" dalam Memengaruhi Hubungan China dan Jepang: Aspek Pariwisata, Hiburan, dan Ekonomi

Tita Dwiningrum, Shannaz Mutiara Deniar, Najamuddin Khairur Rijal
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
titadwiningrum@gmail.com, shannazdeniar@umm.ac.id, najamuddin@umm.ac.id

Abstract

The Yasukuni Shrine controversy as a place of final respect for Japanese soldiers is a sensitive issue related to the Nanjing Massacre issue. This is related to the notion that the temple is a painful symbol for almost all Chinese people. The Japanese government, which was in denial about this issue, made China often raise issues related to the Nanjing Massacre to pressure Japan to admit to the war crimes they had committed before. This research is included in the descriptive research because in this research the writer tries to explain how the influence of Historical Memory related to the Nanjing Massacre issue has on the relationship between China and Japan. This research uses Ducan Bell's concepts of memory, trauma, and world politics to define a more important understanding of the influence of the past or history in shaping or explaining the present situation. The results of this study found that the role of Historical Memory can affect relations between the two countries which have been traumatized by past events, so that this can be a cause of disruption of bilateral relations between the two countries in various aspects, such as the economy, tourism to the problems of public figures.

Keywords: *China, Japan, Nanjing massacre, memory, trauma and world politics.*

Abstrak

Kontroversi Kuil Yasukuni sebagai tempat penghormatan terakhir bagi tentara Jepang merupakan isu yang sensitif terkait permasalahan Nanjing Massacre. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa kuil tersebut merupakan simbol yang menyakitkan bagi hampir seluruh masyarakat China. Pemerintah Jepang yang denial akan isu ini membuat China seringkali mengangkat isu-isu yang berkaitan mengenai Nanjing Massacre untuk menekan Jepang agar mau mengakui kejahatan perang yang telah mereka lakukan dahulu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh Historical Memory terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan konsep memori, trauma, dan politik dunia Ducan Bell untuk mendefinisikan pemahaman yang lebih penting tentang pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan situasi saat ini. Hasil dari penelitian menemukan bahwa adanya peran dari Historical Memory dapat mempengaruhi hubungan kedua negara yang memiliki trauma akan kejadian masa lalu, sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan bilateral antara kedua negara ini dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pariwisata hingga ke permasalahan toko publik.

Kata Kunci: *Cina, Jepang, pembantaian Nanjing, memori, trauma dan politik dunia*

Pendahuluan

China dan Jepang merupakan dua negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Kedua negara yang memiliki wilayah berdekatan ini sering mengalami konflik terkait sejarah masa lalu atau *historical memory* (Purnomo, 2020). Pembahasan akan pengaruh *historical memory* terhadap hubungan China dengan Jepang ini sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi kebangkitan politik identitas, terutama bagi rakyat China yang memegang teguh jiwa nasionalisnya. Pada hubungan antara China dengan Jepang terkait pengaruh *historical memory*-nya sangat terasa, terutama terkait isu Nanjing Massacre atau pembantaian Nanjing.

Sejarah mengenai pembantaian Nanjing terjadi pada akhir 1937 di mana pasukan tentara kekaisaran Jepang saat itu dengan secara brutal membunuh ratusan ribu orang, yang di dalamnya juga termasuk tentara dan warga sipil di Kota Nanking (atau yang biasa disebut Nanjing) di China. Peristiwa tersebut tidak hanya perihal mengenai pembunuhan massal yang dilakukan secara brutal saja, melainkan juga mengenai pemerkosaan yang telah dilakukan oleh khususnya tentara Jepang kepada para wanita di Kota Nanjing. Terdapat jumlah antara 20.000 dan 80.000 korban yang kebanyakan wanita diserang secara seksual dalam peristiwa yang dikenal juga dengan Pemerkosaan Nanking (History.com Editor, 2019).

Karena hal tersebutlah, hubungan bilateral antara kedua negara ini cukup konfliktual terkait adanya pengaruh masa lalu yang tidak baik, sehingga hal itu dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah Asia Timur. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama ini sering kali mengalami pergejolakan di dalamnya, terutama saat Jepang dipimpin oleh Shinzo Abe. Diketahui hal ini berkaitan dengan Abe yang ingin menghidupkan kembali kebanggaan Jepang di masa lalu dengan melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni (Reuters Editor, 2021).

Hal ini jelas memicu kemarahan China dan Korea, mengingat negara ini adalah korban akan kejahatan perang Jepang di masa lalu. Kunjungan terhadap Kuil Yasukuni ini sejak dulu telah menjadi isu yang sensitif terutama bagi China yang menganggap bahwa penghormatan yang dilakukan di kuil tersebut menjadi penghinaan tersendiri bagi korban perang di China akibat kebrutalan tentara Jepang pada saat terjadinya invasi, terutama pada kasus Nanjing Massacre.

Terdapat beberapa kasus yang mempengaruhi kemarahan publik China akibat isu ini, bahkan di antaranya berasal dari artis China itu sendiri. Pada tahun 2019, aktor Zhao Lixin menjadi kontroversi akibat adanya ujaran perihal Nanjing Massacre. Kemudian di tahun 2021, Zhang Zhehan artis yang sedang berada dipuncak karirnya terseret dalam kontroversi akibat mengunjungi Kuil Yasukuni dan kuil Nogi di Jepang. Akibat hal tersebut kedua artis ini mendapat kritikan tajam dari masyarakat China, hingga membuat pemerintah turun tangan dan memboikot artis yang terkait skandal akan isu tersebut. Selain kasus para artis tersebut, banyak hal yang terkait isu ini membuat China melakukan pemboikotan terhadap Jepang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui mengenai pengaruh dari *historical memory* "Nanjing Massacre" ini terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Pada penelitian ini, dengan menggunakan konsep ingatan, trauma, dan

politik dunia Duncan Bell, kita dapat belajar tentang pentingnya memahami pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan kondisi saat ini. Pertanyaan mengenai *historical memory* sendiri telah memainkan peran penting dalam kebangkitan politik identitas, di mana hal tersebut telah berada pada perdebatan mengenai keadilan transnasional, rekonstruksi pasca-konflik, legitimasi kekerasan politik, warisan Holocaust dan sejumlah besar proses dan praktik lainnya (Bell, 2006).

Bell menjelaskan bahwa memori berada pada tingkatan yang sangat umum sehingga mengacu kepada proses atau kemampuan dalam mengingat dan mempertahankan peristiwa atau kesan di masa lalu. Selanjutnya, Bell mendefinisikan memori kolektif sebagai pemahaman umum tentang masa lalu. Sehingga membentuk sebuah cerita dari sekelompok orang yang menjelaskan mengenai dirinya sendiri dengan menghubungkan masa lalu, sekarang dan masa depan dalam pembahasan yang lebih disederhanakan (Bell, 2006).

Hubungan antara memori, trauma dan identitas ini sendiri telah dijelaskan dengan berbagai cara yang sering bertentangan. Terdapat asumsi yang cukup umum tentang bagaimana peristiwa tertentu terjadi, jadi ada kaitannya dengan bagaimana ingatan dan trauma dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, keterlibatan politik, dan tindakan (Bell, 2006). Dalam praktiknya, kebijakan atau tindakan negara dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau memori masa lalu yang mengakar kuat di negara tersebut dan yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan negara.

Hal ini karena luka akibat trauma biasanya tidak mudah sembuh, yang kemudian memunculkan berbagai tindakan untuk menunjukkannya, menyebarkan ingatan akan trauma tersebut dari orang ke orang di masyarakat. Juga menurut konsep ini, kelompok atau individu harus mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu agar dapat keluar dari belenggu ingatan dan trauma (Adityani, 2018). Sehingga konsep ini akan menjelaskan bagaimana memori serta trauma dari kejadian masa lalu akan mempengaruhi padangan China terhadap Jepang, yang pada akhirnya permasalahan ini akan memicu memanasnya hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Tinjauan Literatur

Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu, dalam jurnalnya yang judul *Remembrance of the Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimisation, Emotions and the Rise of China* (Fengqi Qian, 2019) menjelaskan mengenai bagaimana korban dalam melakukan perlawanan terhadap agresi Jepang yang telah menjadi topik penting dalam peringatan era New China. Pada penelitian ini dibahas juga mengenai mengapa orang China masih terus melihat ataupun mengingat penderitaan bangsanya di masa lalu, sementara negara luar berbicara mengenai kebangkitan dari China itu sendiri.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan penyebaran dari *collective memory* di China mengenai *victimisation* masa perang melalui studi kasus tentang Memorial Pembantaian Nanjing. Penulis pada penelitian ini beranggapan bahwa *collective memory of victimisation* merupakan memori emosional yang dibangkitkan oleh pemikiran nasionalisme

baru dan karena hal tersebut merupakan dimensi kontekstual dari presentasi diri yang dimiliki China saat ini.

Memorial Pembantaian Nanjing ini menampilkan cara di mana *collective memory of victimisation* dibentuk dan disebarluaskan di bawah Partai Komunis untuk mempromosikan aspirasi nasional China dan melegitimasi klaim China di dunia kontemporer. Pada penelitian ini pembahasan mengenai *collective memory* sangat membantu penulis untuk dapat menguraikan penjelasan mengenai *historical memory*.

Pada tinjauan literatur pertama ini, hanya membahas bagaimana memory yang dibentuk dari kejadian Nanjing ini dapat membentuk sikap Nasionalisme di China. Pada hakikatnya, suatu negara dapat membangkitkan Nasionalisme tidak hanya dari mengenang tragedi yang sudah terjadi. Pada penelitian ini penulis membuat sudut pandang bahwa tragedi Nanjing ini merupakan tragedi yang paling melukai hati para rakyatnya dan negaranya, sehingga pemerintah China akan lebih mudah dalam mendoktrin jiwa Nasionalisme. Pada pemahaman saat ini, sikap nasionalisme yang dimiliki China memang patut di apresiasi. Namun disisi lain, Sikap China yang seperti ini seringkali menjadi penghambat hubungannya dengan Jepang.

Pembeda dari literatur pertama dengan karya ilmiah yang saat ini penulis tulis adalah bahwa karya yang Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu tulis ini lebih terfokus menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam upaya untuk mentransmisikan secara global perihal tragedi pembantaian Nanjing yang telah dilakukan oleh Jepang dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan ingatan kolektif yang akan memicu sikap nasionalismenya. Sementara pada tulisan yang penulis buat saat ini, lebih berfokus pada dampak dari ingatan memori masa lalu ini dapat memengaruhi hubungan bilateral dari kedua negara ini.

Selanjutnya merupakan jurnal dari Taisuke Fujita and Hiroki Kusano (Kusano, 2020), dengan judul *Denial Of History? Yasukuni Visits As Signaling*. Pada penelitian ini penulis mempunyai maksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kapan dan mengapa para pemimpin politik Jepang memilih untuk melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni di depan umum, meskipun harus mengeluarkan biaya politik yang tinggi dari kunjungan tersebut. Kritik keras dalam dunia internasional sering terjadi akibat kunjungan tersebut. Pada penelitian ini diusulkan tiga kondisi yang dibutuhkan dalam kunjungan semacam itu, seperti: penguasa konservatif, pemerintah yang mendapatkan popularitas tinggi, serta pandangan Jepang terhadap ancaman dari China. Berkenaan dengan yang terakhir, ancaman keamanan dari China telah memungkinkan Jepang untuk menggunakan kunjungan ini sebagai sinyal yang kredibel dari tekadnya terhadap China. Analisis komparatif kabinet Jepang setelah pertengahan 1980-an mendukung argumen ini.

Pada penelitian yang ditulis oleh Hiroki Kusano, penelitian ini hanya menunjukkan perbandingan yang sangat terbalik terkait bagaimana pemerintah Jepang yang menolak bahwa negaranya pernah melakukan hal keji tersebut. Penulis menganggap bahwa China terlalu berlebihan dalam mengenang tragedi Nanjing, dan hal ini menjadi ancaman bagi negara Jepang. Politik antara Jepang dan China digambarkan penulis sebagai kedua negara yang saling menyalahkan satu sama lain, oleh karena itu Jepang menunjukkan tekadnya

dalam mengunjungi Yasukuni Shrine agar dunia mengetahui bahwa meskipun Jepang telah melakukan tindakan keji tersebut, tetapi ia masih mengakui tragedi tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penelitian dari Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu, yang dimana pada tulisan tersebut China seakan membesar-besarkan tragedi Nanjing untuk menjadikannya sebagai landasan pembangun Nasionalisme di negaranya dan digambarkan seakan Jepang tidak mengakui kekejian tragedi Nanjing, sedangkan penelitian kedua ini menunjukkan bahwa Jepang yang merasa terancam oleh China, dengan mengunjungi Kuil Yasukuni, pemerintah Jepang tetap mengakui akan kekejian yang pernah dilakukan negaranya, akan tetapi tidak separah yang dituliskan pada penelitian pertama.

Pembeda dari literatur kedua ini dengan penelitian yang penulis buat adalah mengenai fokus permasalahan dari kuil yasukuni, dimana pada tulisan Taisuke Fujita and Hiroki Kusano ini berfokus pada permasalahan mengenai kunjungan ke kuil ini yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Jepang saja yang menimbulkan kontroversi. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis tidak hanya terfokus pada pejabat pemerintahan Jepang yang mengunjungi kuil, namun juga kontroversi mengenai artis dalam negeri China itu sendiri yang sedang mengunjungi kuil, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan publik.

Metode

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pengolahan data berupa kata-kata, lisan atau verbal (Miles B, 2008). Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh *historical memory* terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah dan artikel di internet yang relevan untuk pembahasan penelitian ini.

Nanjing Massacre

Setelah kemenangannya pada First Sino-Japanese War ditahun 1895 , Jepang semakin menunjukkan dominansinya di wilayah Asia Timur dan bahkan juga sampai pada wilayah Asia Tenggara. Kemenangan Jepang tersebut menyebabkan China harus rela kehilangan Taiwan, serta diharuskan membuka jalur perdagangan di daerah dekat lautnya. Selanjutnya pecahnya kasus Nanjing Massacre dimulai saat Jepang melancarkan invasi keduanya.

Pada tahun 1931 Jepang melakukan invasi ke Manchuria, di mana pihak China meyakini bahwa hal tersebut merupakan awal dari Second Sino-Japanese War II. Hal ini dikarenakan Manchuria secara historis masih merupakan bagian dari China. Namun, beberapa pihak Jepang menyangkal dan berpendapat bahwa pecahnya perang di Manchuria merupakan ulah dari tentara yang tidak bertanggung jawab yang bertindak seakan memiliki kepentingan bisnis Jepang di daerah tersebut (Captivating History, 2020). Singkatnya pada 13 Desember 1937, Nanjing yang waktu itu menjadi Ibu Kota Nasionalis China berhasil direbut oleh Jepang. Setelah menduduki Nanjing, tentara Jepang mulai melancarkan aksinya dengan

melucuti senjata yang dimiliki oleh tentara China dan berlanjut pada pembantaian terhadap tentara bahkan warga sipil Nanjing yang berlangsung selama enam minggu.

Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa kejahatan yang dilakukan Jepang juga termasuk pemerkosaan, pembakaran dan perampokan. Kebanyakan korban dari pembantaian Nanjing adalah warga sipil laki-laki, hal ini dikarenakan Komandan dari pasukan tentara Jepang meyakini bahwa tentara China telah menanggalkan seragamnya dan berbaur dengan penduduk. Menurut data Documents of Nanjing Massacre dalam *International Memory of the World Register* yang diterbitkan UNESCO disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang yang dibunuh di Nanjing.

UNESCO telah mengumpulkan dokumen atas Pembantaian Nanjing, tidak hanya terdiri dari arsip asli China dan Jepang. Namun, UNESCO juga memiliki film dan foto dokumenter, buku harian, dan file Zona Keamanan Internasional Nanjing yang diabadikan oleh warga dari Amerika Serikat, Jerman, Denmark, dan lain-lain (Unesco, 2015). Sehingga, data yang dimiliki UNESCO cukup akurat, dan sulit untuk dibantah oleh Jepang.

Akibat kejahatan perang yang dilakukan Jepang dahulu, hingga saat ini China masih sangat sensitif akan isu sejarah tersebut. Hal ini mengakibatkan muncul sikap anti Jepang pada masyarakat China, bahkan pemerintah tidak segan akan mengambil tindakan yang tegas terkait isu ini. Isu mengenai Nanjing Massacre yang sering mengganggu hubungan kedua negara ini adalah mengenai kunjungan ke kuil Yasukuni, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kuil tersebut merupakan simbol yang menyakitkan bagi hampir seluruh masyarakat China.

Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai kemarahan publik China apabila berkaitan dengan isu sejarah ini. Dimulai pada 2017, di mana China melakukan boikot terhadap jaringan hotel APA Group di Jepang. Kasus ini terjadi akibat Toshio Motoya yang merupakan ketua APA Group mendistribusikan bukunya menggunakan nama samaran Teng Maezhi secara luas di jaringan hotelnya yang berisikan mengenai klaim atas Nanjing Massacre yang sebenarnya tidak ada dan jelas merupakan rekayasa dari China saja (BBC News, 2017). Motoya sendiri diketahui merupakan seorang revisionis sejarah yang aktif, sehingga besar kemungkinan ia akan bertahan dan tidak akan menarik buku tersebut.

Hal yang menjadi permasalahan selain yang dijelaskan di atas adalah buku yang berjudul "*Real Japanese History: Theoretical Modern History*" pada bagian tentang penyangkalan dijelaskan bahwa tentara Jepang telah melakukan pemaksaan terhadap wanita untuk dijadikan wanita penghibur atau lebih yang dikenal dengan sebutan *Comfort Women*. Permasalahan ini pula, baik China dan Korea Selatan selalu berselisih dengan Jepang. Buku tersebut dicetak menggunakan bahasa Jepang dan Inggris, namun tidak ada penerbit dalam buku tersebut (Yi, 2017). Sehingga hal ini memicu reaksi dari China, bahwa buku tersebut dikhususkan untuk memprovokasi.

Administrasi Pariwisata Nasional China mengambil tindakan tegas akan isu ini dengan melakukan konferensi pers, menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hotel APA tersebut merupakan provokasi yang dilakukan secara terang-terangan kepada wisatawan China dan merupakan pelanggaran serius terkait etika dasar industri pariwisata.

Tindakan serius pihak China akan isu ini adalah dengan meminta semua perusahaan perjalanan pariwisata luar serta platform layanan *e-commerce* pariwisatanya untuk sepenuhnya berhenti bekerja sama dengan APA Group (Yicai, 2017).

Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menjelaskan bahwa pada kenyataan yang ada beberapa kekuatan di Jepang tidak mau mengakui sejarah masa lalunya, bahkan sering kali berusaha untuk menyangkal dan memutarbalikkan fakta. Sehingga China sekali lagi mendesak pihak Jepang agar mampu menjelaskan dengan baik tentang sejarah dengan benar pada rakyatnya (Junsong, 2017).

Kasus lain terkait isu ini menjerat artis dalam negeri China sendiri, yakni Zhao Lixin dan Zhang Zhehan. Zhao Lixin sendiri menjadi viral ketika ia mengungkapkan opininya terkait Nanjing Massacre di tahun 2019. Pada unggahannya di sosial medianya Zhao Lixin mempertanyakan mengapa militer Jepang tidak menjarah serta menghancurkan Istana Beijing selama Second Sino-Japanese War II: "Jepang menduduki Beijing selama delapan tahun. Mengapa mereka tidak mencuri relik dari Museum Istana dan membakarnya [selama itu]? Apakah ini sejalan dengan sifat penjajah?".

Zhao juga memberikan komentar terkait Nanjing Massacre, ia berpendapat bahwa terjadinya hal tersebut merupakan resiko akibat dari perlawanan China terhadap invasi Jepang pada saat itu (Koetse, 2019). Zhao Lixin memiliki pandangan sejarah yang berbahaya dan ia terkesan tidak berpikir panjang akan tindakannya tersebut, secara sederhana dia beranggapan bahwa jika seandainya kota Nanjing tidak melakukan perlawanan, maka pembantaian tidak mungkin terjadi. Hal ini menjadikan para netizen geram akan hal tersebut. Pemerintah China tidak segan dalam mengambil tindakan hukum yang tegas kepada warga negaranya terkait isu-isu yang sensitif, namun hukuman yang didapat Zhao Lixin cukuplah ringan hanya sebatas sanksi sosial dengan penonaktifan dalam dunia hiburan.

Pada isu terbaru di tahun 2021, Zhang Zhehan yang juga merupakan artis besar di China telah menjadi topik yang cukup menyita perhatian publik sejak foto dirinya yang diambil di Kuil Yasukuni yang kontroversial menjadi viral (Jones, 2021). Padahal foto yang diunggah dalam akun Instagram tersebut diambil pada tahun 2018 dan 2019, di mana selain mengunjungi kuil Yasukuni Shrine, sebelumnya Zhang juga diketahui telah menghadiri pernikahan di kuil Nogi. Seperti yang diketahui bahwa kedua kuil ini sejak lama telah menjadi tempat yang sering menimbulkan konflik bagi kedua negara, di mana kuil Yasukuni merupakan tempat untuk menghormati para korban perang selama Perang Dunia II, termasuk juga para penjahat perang Jepang. Sedangkan kuil Nogi merupakan tempat untuk menghormati para perwira militer Kekaisaran Jepang yang telah menginvasi China selama Perang Duni II (Jun, 2021).

Foto lain yang cukup kontroversial adalah saat Zhang tengah berpose dengan perempuan berusia sekitar 81 tahun, di mana diketahui wanita tersebut merupakan Dewi Sukarno (Koetse M. , 2021). Seperti yang diketahui Dewi Sukarno merupakan mantan ibu negara Indonesia. Pernyataan beliau mengenai anti-China di masa lalu, menjadikannya kontroversial dalam isu ini. Pada tahun 2017 beliau juga dikaitkan dengan adanya pembelaan dari jaringan hotel APA Jepang ketika mendapatkan kecaman akibat menempatkan buku sayap kanan di kamar tamunya (Ogura, 2017). Sehingga bisa dikatakan bahwa aktor China

Zhang tidak hanya telah melanggar satu isu sensitif mengenai kuil Yasukuni saja melainkan dua isu lainnya yang masih berkesinambungan. Pada kasus ini Zhang mendapatkan sanksi yang tegas dari masyarakat bahkan pemerintahan China dengan memboikot dirinya dari dunia hiburan China.

Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021, Asosiasi Pertunjukan China menerbitkan pengumuman secara langsung untuk menegur secara langsung aktor Zhang Zhehan atas perilakunya yang kurang pantas dalam mengunjungi Kuil Yasukuni, serta akhir dari keputusan bersama adalah pemboikotan praktik yang dilakukan Zhang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Akibatnya kerugian jelas didapat Zhang, hal ini dikarenakan beberapa merek dan kru film serta televisi menyatakan bahwa mereka telah memutuskan kontrak mereka dengan artis tersebut. Terlebih Sina Weibo juga turut menutup akun dari Zhang, hal ini akibat dari permasalahan yang dialami Zhang Zhehan ini mendapat kritik dari Situs web Komisi Pusat dalam bagian Inspeksi Disiplin bahwasanya “ketidaktahuan” yang dikatakan Zhang tidaklah dapat ditoleransi dalam pengetahuan sejarah negara ini (Yanjing, 2021).

Sikap anti Jepang di China saat ini jelas terlihat apabila menyangkut kuil Yasukuni, di mana setiap hal yang berhubungan dengan kuil ini akan membuat publik China marah. Pada 9 April 2005, masyarakat China menyerukan demo anti-Jepang yang dilakukan di Zhongguancun, Beijing. Hal ini terjadi akibat masyarakat China kesal dengan kunjungan tahunan rutin ke Kuil Yasukuni yang dilakukan oleh Koizumi Junichiro setelah menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 (Winter, 2017).

Bahkan pada peraturan akan kunjungan masuk Kuil Yasukuni ini sendiri melarang warga China, Korea Selatan hingga Taiwan secara tidak tertulis masuk ke dalam area aula kuil untuk menghindari adanya konflik. Bahkan untuk menghindari konflik secara meluas, Kaisar Jepang hingga kini menghindari untuk mengunjungi kuil tersebut. Namun, para anggota parlemen Jepang dengan secara rutin tetap mengunjungi kuil ini, meskipun pada akhirnya tetap mendapat kritik keras dari China, Korea Selatan dan negara lainnya.

Kuil Yasukuni sendiri berada dalam Ibu Kota Jepang, dibangun pada tahun 1869 atas perintah Kaisar Meiji yang diperuntukkan bagi korban dari sekitar 2,5 juta tentara beserta keluarga yang tewas saat perang. Kebanyakan korban di dalamnya merupakan Perwira serta tentara Jepang yang tewas akibat dari agresi yang dilakukan terhadap China dan Perang Pasifik. Seperti halnya yang telah lama disampaikan media luar, hingga saat ini Kuil Yasukuni merupakan “duri yang berada disisi negara-negara Asia Timur” (BBC Editor, 2018).

Isu Ekonomi dalam Nanjing Massacre

Pasca perang, beberapa negara (termasuk China) yang telah mengalami penderitaan serta kerugian di bawah kekuasaan militer Jepang saat itu, telah menuntut adanya ganti rugi secara menyeluruh. Namun, akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat, China pada akhirnya melepaskan haknya atas kompensasi yang harusnya diberikan oleh Jepang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat itu, tingkat kemampuan Jepang yang dianggap belum mampu untuk membayar Reparasi pasca perang dikarenakan kealahannya terhadap Amerika Serikat mengakibatkan kelumpuhan Ekonomi Jepang secara menyeluruh. Kendati

demikian pada tahun 1979, Jepang secara bertahap telah memberikan Bantuan Luar negeri atau Official Development Assistance (ODA) kepada China. Sehingga hal ini terlihat seperti cara Jepang dalam usaha untuk menebus kesalahan akan masa lalu (Solís, 2020).

Isu ekonomi antara Jepang dengan China pertama terkait permasalahan History terjadi di tahun 1985 pada saat proses tahap kedua pemberian ODA dari Jepang untuk China. Hubungan kedua negara ini memanas di akibatkan adanya tragedi Tiananmen dan kunjungan PM Jepang yang menjabat saat itu ke Kuil Yasukuni. Sehingga hasil dari peristiwa tersebut membuat Jepang menjatuhkan sanksi kepada China, dengan menunda pemberian pinjaman berupa milyaran dollar kepada China. Selain itu Jepang juga menarik seluruh para ahli Jepang yang sedang bekerja dalam proyek-proyek di China (Zulhijah, 2013). Permasalahan kedua akan isu ini terjadi lagi pada tahun 2006, ketika Junichiro Koizumi yang menajadi PM Jepang pada saat itu melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni. Hal ini mengakibatkan penurunan akan ODA yang diberikan Jepang kepada China hingga ditahun berikutnya (Zulhijah, 2013). Namun, pada dasarnya hubungan ekonomi antara China dengan Jepang hingga saat ini memang selalu mengalami naik turun yang disebabkan oleh berbagai faktor, bukan hanya terkait luka lama akibat perang saja. Namun, konflik akibat adanya peran History Memory ini juga berperan penting dalam perkembangan hubungan ekonomi dari kedua negara tersebut. Maka dari itu dengan melalui ODA, Jepang berharap agar bisa mengurangi tensi dari permasalahan sejarah ini dengan China.

Tidak hanya dengan China, pada tahun 2015 Jepang melayangkan ancaman terhadap UNESCO (McCurry, 2015). Ancaman berupa penarikan dana yang dilakukan Jepang ini dikarenakan UNESCO telah memasukkan dokumen China mengenai pembantaian Nanjing ke dalam daftar Memori Dunia, meskipun Jepang telah melakukan protes sebelumnya. Hingga pada tahun 2016, Menteri luar negeri Fumio Kishida, mengonfirmasi Jepang telah menanggukuhkan kontribusi kepada UNESCO senilai 4,4 miliar yen (Agence France-Presse in Tokyo, 2016). Hal ini membuktikan permasalahan Nanjing Massacre ini merupakan isu yang sensitif bagi kedua negara tersebut, sehingga mampu mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara dalam segi ekonomi.

Kekuatan Politik Jepang untuk Melenyapkan Memori Pembantaian

Akademi sejarah di Jepang mengakui kekejaman di Nanjing sebagai fakta sejarah. Hampir semua situs sejarah dan kamus lain memiliki entri tentang kekejaman "Insiden Nanjing," "Kekejaman Nanjing," atau "Pembantaian Nanjing." Misalnya, Kôjien, kamus istilah Jepang paling otoritatif yang diterbitkan oleh Iwanami Shoten, menjelaskan di bawah entri "Pembantaian Nanjing" bahwa "militer Jepang membantai sejumlah besar tentara yang menyerah, tawanan perang, dan warga biasa di dalam dan sekitar kastil Nanjing; apalagi, mereka melakukan kejahatan seperti pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan, ketika Nanjing ditaklukkan pada tahun 1937 dalam Perang Tiongkok-Jepang."

Pada tanggal 2 Agustus 1997, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Departemen Pendidikan tidak konstitusional untuk menolak deskripsi Pembantaian Nanjing dan kekerasan seksual bersamaan dalam buku teks sejarah yang ditulis oleh sejarawan Saburô

Ienaga. Sistem peradilan Jepang juga telah mengakui bahwa kekejaman di Nanjing adalah fakta sejarah dan pada kenyataannya, inilah alasan mengapa sebagian besar buku teks sejarah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas Jepang mulai memasukkan Pembantaian Nanjing sejak awal (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021).

Pandangan resmi pemerintah, sebagaimana disajikan di halaman utama Kementerian Luar Negeri, adalah bahwa “pemerintah Jepang percaya bahwa tidak dapat disangkal jika setelah masuknya Angkatan Darat Jepang ke Nanjing pada tahun 1937, pembunuhan dari sejumlah besar non-kombatan, penjarahan, dan tindakan lainnya telah terjadi” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021) Namun demikian, alasan utama banyak orang Jepang tidak mengetahui rincian pembantaian itu adalah karena, (1) guru tidak mengajarkannya secara rinci, (2) media massa menghindari liputan luas tentang kekejaman tersebut, dan (3) para revisionis pro-kekaisaran telah melancarkan kampanye yang berhasil dengan menuduh bahwa Pembantaian Nanjing adalah ilusi atau rekayasa semata.

Selain itu, para revisionis dan ekstremis sayap kanan yang telah membuat ancaman dan terlibat dalam pelecehan membuat tanggapan atas pidato, publikasi, laporan berita, dan pameran Pembantaian Nanjing sebagian besar tidak tertandingi. Pada bulan September 2004, misalnya, aktivis sayap kanan dengan pengeras suara truk mereka datang ke penerbit Sheisha dan menuntut mereka menghapus atau merevisi ilustrasi yang menggambarkan kekejaman Nanjing dalam serial komik berjudul *The Country is Burning* oleh komikus populer, Hiroshi Motomiya. Hingga akhirnya penerbit serta artis meminta maaf dan menjanjikan revisi.

Pada bulan Maret 2005, Museum Perdamaian Prefektur Saitama menghapus istilah “Pembantaian Nanjing” dan foto kekejaman di Xiaguan yang diambil oleh Moriyasu Murase dalam kronologi yang ditampilkan. Setelah revisi dilakukan, para pengunjung hanya mengetahui bahwa “pada 13 Desember 1937, militer Jepang merebut Nanjing”. Dipercaya secara luas bahwa Kiyoshi Ueda, gubernur prefektur yang mendukung gerakan revisionis, memerintahkan museum untuk melakukannya.

Pada Juni 2006, Ueda menyatakan di majelis prefektur bahwa “tidak ada wanita penghibur militer.” Dia juga menunjuk Shirô Takahashi, profesor di Universitas Meisei dan wakil ketua Masyarakat Jepang untuk Reformasi Buku Teks (organisasi revisionis yang didirikan pada 1997), menjadi anggota dewan pendidikan di Saitama. Sudah sebanyak tiga kali selama pascaperang di Jepang, pemerintah telah melancarkan tantangan kritis terhadap buku teks sejarah dalam upaya untuk mengurangi atau menghapus deskripsi agresi masa perang Jepang, terutama kekejaman seperti Pembantaian Nanjing. Tantangan pertama terjadi pada tahun 1955, dan yang kedua terjadi pada awal 1980-an. Yang ketiga dimulai pada tahun 1997 dan terus berlanjut hingga hari ini. Tantangan ketiga yang sedang berlangsung ini mendapatkan kekuatannya dari kaum revisionis, “konservatif akar rumput”, dan ekstremis sayap kanan, dan ini merupakan tantangan yang paling kuat dan agresif. Para revisionis ini telah berhasil menghapus kata-kata “wanita penghibur bagi militer Jepang” (*Nihongun ianfu*) dari buku pelajaran sejarah SMP. Target mereka berikutnya adalah penghapusan Pembantaian Nanjing di buku pelajaran sekolah menengah pertama, karena pembantaian itu adalah satu-satunya komponen kekejaman masa perang Jepang yang masih belum tersentuh dalam buku pelajaran sekolah menengah pertama (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021).

Politik China dalam Mengenang Nanjing Massacre

Pemerintah China telah melakukan berbagai upaya agar kekejian yang telah dilakukan Jepang tidak terlupakan begitu saja. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya sebuah peringatan nasional pertama kalinya pada 13 Desember 2014. Upaya yang dilakukan Presiden China, Xi Jinping pada masa itu memiliki tujuan agar tidak ada lagi yang menyangkal akan adanya pembantaian Nanjing (The Guardian, 2014). Pada bulan Februari, Kongres Rakyat Nasional China, legislatif yang dikendalikan partai Komunis negara itu, menjadikan peringatan pembantaian Nanjing sebagai hari peringatan resmi bersama pada 3 September untuk menandai kemenangan China dalam melawan Jepang pada tahun 1945.

Jepang dan Republik Rakyat China menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1972. Namun hubungan tersebut telah tegang oleh pertikaian atas pulau-pulau tak berpenghuni di Laut China Timur dan pandangan serta tindakan nasionalis oleh politisi Jepang, termasuk kunjungan ke kuil Yasukuni di Tokyo, yang memperingati kematian perang Jepang, hal ini juga termasuk mengenai penjahat perang yang dihukum pada perang dunia kedua

Kejadian memilukan yang terjadi pada China tentu saja tidak ingin hanya dikenang oleh para korban-korban yang mengalami trauma mendalam. Sehingga pemerintah China pun membuat kebijakan untuk mengingat dan mengenang kejadian memilukan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan di China. Sehingga para penerus bangsa China akan selamanya mengingat kekejian Jepang yang dilakukan kepada rakyat Nanjing. Pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan Kurikulum Sejarah Standar untuk Pendidikan Wajib di Sekolah Penuh Waktu. Berdasarkan standar yang ditetapkan, Beijing Teachers College Press menerbitkan buku teks berjudul *New Century: Standard History Textbook in Mandatory Education*. Dalam buku ini digambarkan Pembantaian Nanjing ke dalam pelajaran sejarahnya, meskipun memiliki beberapa perbedaan perspektif antara Jepang dengan China dalam menjelaskan tragedi Nanjing. (Kasahara, 2007)

Pada bulan Desember 1937, Surat Kabar Tōky Nichinichi Jepang menggambarkan kontes pembunuhan dari sudut pandang pemenang, bahwa militer Jepang beranggapan kontes pembunuhan ini sebagai sesuatu yang akan “meningkatkan kejayaan nasional” dan menyebutnya sebagai “prestasi yang terhormat.” Bahkan menurut statistik, perkiraan kematian yang disebabkan oleh kekejaman Jepang terhadap penduduk Nanjing yang tidak bersenjata dan tentara Cina berjumlah lebih dari 300.000 hanya selama enam minggu selama diduduki oleh militer Jepang. Pembantaian Nanjing adalah salah satu tindakan kekerasan terbesar yang dilakukan oleh agresor Jepang terhadap orang-orang Tionghoa. Deskripsi yang berbeda dari Pembantaian Nanjing tercermin dalam pemahaman yang berbeda tentang kekejaman.

Pemerintah Jepang menutup erat kekejian yang pernah mereka lakukan dari para penerus-penerusnya, sehingga yang rakyat Jepang ketahui hanyalah semboyan Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Dengan kata lain, yang rakyat Jepang ketahui di masa kini adalah bahwa negaranya tidak mungkin melakukan kekejian tersebut, terlebih negara-negara tetangganya. Berbeda halnya dengan rakyat China, terutama di Nanjing (Kasahara, 2007).

Kesimpulan

Dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari kejahatan perang bukanlah suatu hal yang main-main. Pada kenyataannya pengaruh sejarah serta trauma ini mampu membuat hubungan kedua negara ini tidak berjalan dengan baik. Hubungan tidak baik ini lebih banyak dikaitkan atas sikap Jepang dalam menanggapi permasalahan kejahatan perang terkait Nanjing Massacre, kunjungan yang dilakukan parlemen Jepang ke Kuil Yasukuni, serta pertentangan antara China dengan Jepang terkait kedaulatan atas pulau-pulau yang berada di wilayah Laut China Timur. Namun, dibalik persetujuan kedua negara ini terkait masa lalunya, China dan Jepang merupakan mitra dagang yang memiliki peranan penting bagi satu sama lain dan memiliki ikatan ekonomi yang kuat.

Peran dari *historical memory* serta trauma akan masa lalu yang buruk nyatanya memang sangat mempengaruhi hubungan serta opini publik kedua negara ini. Pada permasalahan ini jelas Jepang harus berhati-hati setiap kali mengambil tindakan apabila menyangkut isu sejarah ini. Memori kolektif yang tercipta di kalangan China menimbulkan tantangan tersendiri bagi Jepang dalam setiap langkah terkait hubungan kedua negara ini. Pada kasus yang sudah dijelaskan di atas, bahwa opini publik juga sangat mempengaruhi akan sebuah isu menjadi membesar sehingga mampu menimbulkan konflik bagi hubungan kedua negara tersebut.

Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dari isu Nanjing Massacre ini cukup mempengaruhi hubungan antara China dengan Jepang. Terlebih terkait kuil Yasukuni yang dianggap sebagai tempat penghormatan bagi penjahat Jepang yang telah secara brutal melakukan kekejamannya terhadap rakyat China dalam pembantaian Nanjing. Isu ini termasuk dalam pengaruh *historical memory* yang masih melekat pada rakyat China yang merasakan kekejaman perang di masa invasi Jepang kala itu, yang memicu terjadinya sikap anti Jepang di China. Sehingga dalam permasalahan ini kedua negara ini sering mengalami pergolakan dalam hubungan bilateralnya akan permasalahan sejarah masa lalunya tersebut. Pemerintah China sendiri tidak pernah pandang bulu dalam menghadapi isu tersebut, di mana diketahui beberapa artis China yang tersangkut dalam isu ini akan langsung di *blacklist* dari dunia hiburan, serta akan mendapat kritik tajam dari masyarakat China.

Maka bisa dianggap bahwa perang tidak hanya menimbulkan kerusakan dan korban di masa lalu, namun juga menimbulkan luka dan trauma di masa depan. Sehingga meskipun kedua negara ini telah mendapati kesepakatan perdamaian serta telah menjalin hubungan bilateral yang baik, namun tidak menutup kemungkinan apabila masih terdapat dendam akan masa lalu yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan ketegangan pada kedua negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adityani, F. D. (2018). Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/j>, pp. 22-30.
- Agence France-Presse in Tokyo. (2016, October 14). *Japan halts Unesco funding following Nanjing massacre row*. Diakses pada 24 November 2022 dari: theguardian.com/world/2016/oct/14/japan-halts-unesco-funding-nanjing-massacre-row
- BBC Editor. (2017, Januari 19). *Posted Book Denying Nanjing Massacre Japanese APA Hotel Chain Boycotted by China*. BBC News. Diakses 16 Februari 2022, dari <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-38673361>
- BBC Editor. (2018, Oktober 19). *Yasukuni Shrine - Why Japanese Emperor Akihito never visited*. BBC News. Diakses 21 Februari 2022, dari <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-45877599>
- Bell, D. (2006). *Memory, Trauma and World Politics Reflections on the Relationship Between Past and Present*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Captivating History, (2020). *The Second Sino-Japanese War A Captivating Guide to Military Conflict That Began between China and Japan, Including Events Such as the Japanese Invasion of Manchuria and the Nanjing Massacre*. s.l: Captivating History.
- Guo-Qiang, F. Q. (2019). *Remembrance of the Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimisation, Emotions and the Rise of China*. Deakin University. CHINA REPORT 55 : 2 (2019): 81-101.
- History.com editors,(2019). *Nanjing Massacre*. Diakses 12 Februari 2022, dari <https://www.history.com/topics/japan/nanjing-massacre>
- Jones, J. (2021). *Op-Ed Cyber Bullying and Fake News: What You Should Know About the Zhang Zhehan Story*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com>
- Jun, H. L. a. X. (2021). *Chinese actor Zhang Zhehan 'pays heavy price' by posing at Japan's notorious Yasukuni Shrine; 'all brands end cooperation'*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231431>
- Junsong, C. (2017). *The Ministry of Foreign Affairs talks about the placement of right-wing books in Japanese hotels: Japan should educate its citizens with a correct view of history*. Diakses 17 Februari 2022, dari <http://www.xinhuanet.com>
- Kasahara, T. (2007). *Reconciling Narratives of the Nanjing Massacre in Japanese and Chinese Textbooks*. analyse représentée à la United States Institute of Peace le, 30.
- Koetse, M. (2019). *Sina Weibo issued a statement on April 16 that the Weibo account of the Chinese-Swedish actor Zhao Lixin has been terminated following remarks he made about Japan's invasion of China and the Second Sino-Japanese War*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com/chinese-actor-zhao-lixin-banned-from-weibo-over-comments-on-second-sino-japanese-war/>
- Koetse, M. (2021). *"I Deeply Love My Motherland!" - Chinese Actor Zhang Zhehan Under Fire for Yasukuni and Nogi Shrine Photos*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com/i-deeply-love-my-motherland-chinese-actor-zhang-zhehan-under-fire-for-yasukuni-and-nogi-shrine-photos>

- Kusano, T. F. (2020). Denial of History? Yasukuni Visits As Signaling. *Journal of East Asian Studies* (2020), (<https://doi.org/10.1017/jea.2020.2>), 1 of 26.
- Kyung-Hoon, K. (2021). *Explainer: Why Yasukuni shrine is a controversial symbol of Japan's war legacy*. Reuters. Diakses 28 Januari 2022, dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-yasukuni-shrine-is-controversial-symbol-japans-war-legacy-2021-08-13/>
- McCurry, J. (2015, October 13). *Japan threatens to halt Unesco funding over Nanjing massacre listing*. Diakses 24 November 2022 dari <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/japan-threatens-to-halt-unesco-funding-over-nanjing-listing>
- Miles B, M. d. H. (2008). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (February 1st, 2021). *How does the Government of Japan recognize the history concerning the previous war?*. Diakses pada http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq16.html#q8
- Ogura, J. G. a. J. (2017). *China boycotts Japan hotel chain APA over Nanjing Massacre denials*. CNN News. Diakses 17 Februari 2022, dari <https://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/japan-china-nanjing-massacre-hotel/index.html>
- Purnomo, N. P. (2020). Revisionisme Sejarah Jepang terhadap Peristiwa Pembantaian Nanjing. *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7 No. 1(Universitas Brawijaya), 44.
- Sina Editor. (2017, Agustus 15). *Media: Every Chinese should go to the Yasukuni Shrine to see the dirtiest soul*. Sina News. Diakses 21 Februari 2022, dari <http://mil.news.sina.com.cn/2017-08-15/doc-ifyixias0916531.shtm>
- The Guardian. (2014, Desember 13). *China Remembers Nanjing Massacre*. Diakses 3 Maret 2022, dari <https://www.theguardian.com/world/2014/dec/13/china-remembers-nanjing-massacre>
- UNESCO, t.thn. *International Memory of the World Register: Documents of Nanjing Massacre*. UNESCO. Diakses 15 Februari 2022, dari https://en.unesco.org/sites/default/files/china_nanjing_en.pdf
- Yanjing, Z., (2021). *Why don't people forgive Zhang Zhehan's "ignorance"*. China News. Diakses 21 Februari 2022, dari <https://www.chinanews.com.cn/y1/2021/08-17/9544989.shtml>
- Yi, D., 2017. *Japan does not withdraw right-wing book hotel boycotted by Xinhua News Agency reporter on-site visit*. Xinhua News. Diakses 16 Februari 2022, dari http://www.xinhuanet.com//2017-01/18/c_1120339958.htm
- Yicai.com NBD News, (2017). *China International Travel Service Announced a Full Boycott of Japan's APA Hotel Group to Terminate All Cooperation*. National Business Daily. Diakses 16 Februari 2022, dari <http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-25/1072963.html>
- Zulhijah, F. (2013). *Kepentingan Jepang Dalam Pemeberian Official Development Assistance Terhadap Cina Pada Tahun 2008*. Yogyakarta: UMY Repository.